



Dinamika Kota Batam sebagai Kota Wisata Tahun 2007 – 2024

Fadhriel Muhammad Akbar^{1*}, Anak Agung Inten Asmariati², Anak Agung Ayu Rai Wahyuni³

^{1,2,3} Universitas Udayana

Korespondensi penulis: fadhielmhdakbar@gmail.com

Abstract. *Tourism plays a strategic role in national economic development, including in Batam City. Batam's geographical location, directly bordering Singapore and Malaysia, makes it a main gateway for international tourists visiting Indonesia. Since being designated as a Free Trade and Free Port Area through Government Regulation No. 46 of 2007, Batam has transformed from an industrial zone into a tourist city. This study analyzes the dynamics of Batam's development as a tourist city during the 2007–2024 period using a descriptive analytical historical approach, drawing on primary and secondary sources. The findings indicate that Batam's tourism development has been influenced by its strategic position, policy support, and improvements in infrastructure and connectivity. The institutional integration between the Batam City Government and the Batam Authority (BP Batam) through the ex-officio leadership policy since 2019 has strengthened the synergy between regional economic management and tourism development. The establishment of the Nongsa Digital Park SEZ (2021) and the Batam International Tourism and Health SEZ (2024) mark important milestones in the transformation toward a modern tourism destination based on digital, health, and MICE sectors. This reflects Batam's efforts to enhance its global competitiveness and realize sustainable tourism development in Indonesia's border region.*

Keywords: *Batam, Tourism, Free Trade Zone, BP Batam, Special Economic Zone, Development History*

Abstrak. Pariwisata berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk di Kota Batam. Letak geografis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikannya pintu gerbang utama wisatawan mancanegara. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Batam bertransformasi dari kawasan industri menjadi kota wisata. Penelitian ini menganalisis dinamika pengembangan Batam sebagai kota wisata periode 2007–2024 dengan pendekatan sejarah deskriptif analitis menggunakan sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata Batam dipengaruhi oleh posisi strategis, dukungan kebijakan, serta peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Integrasi kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam melalui kebijakan ex-officio sejak 2019 memperkuat sinergi pengelolaan ekonomi daerah dan pariwisata. Penetapan KEK Nongsa Digital Park (2021) dan KEK Pariwisata & Kesehatan Internasional Batam (2024) menjadi tonggak penting dalam transformasi menuju destinasi wisata modern berbasis digital, kesehatan, dan MICE. Hal ini mencerminkan upaya Batam meningkatkan daya saing global dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia.

Kata kunci: Batam, Pariwisata, Kawasan Perdagangan Bebas, BP Batam, KEK, Sejarah Pembangunan

LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Riau, memiliki tiga destinasi unggulan pariwisata yang dikenal dengan konsep 3S (*Size, Sustain, and Spread*), yaitu Batam, Bintan, dan Tanjungpinang (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, 2025). Di antara ketiganya, Kota Batam menempati posisi yang sangat strategis dan bahkan tercatat sebagai salah satu daerah penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak di Indonesia setelah Jakarta dan Bali (Kata Batam, 2025). Capaian tersebut tidak terlepas dari pengembangan unsur utama pariwisata yang dikenal dengan konsep 3A, yakni amenitas, aksesibilitas, dan atraksi, yang secara bertahap dikembangkan untuk mendukung daya tarik Batam sebagai destinasi wisata (Samson Rambah Pasir, Komunikasi Pribadi, 23 September 2025). Namun demikian, seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pariwisata Batam juga semakin beragam, baik dalam aspek daya saing destinasi, kualitas sumber daya manusia, maupun dinamika kebutuhan wisatawan (Lazuardi Pare,

Komunikasi Pribadi, 19 September 2025).

Seiring dengan pesatnya pembangunan, pada tahun 1983 Batam mulai diarahkan sebagai kawasan kepariwisataan dan ditetapkan sebagai kota administratif di bawah kewenangan gubernur, meskipun pengelolaan pembangunan kawasan tetap berada dalam kendali Otorita Batam. Penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 menandai fase baru dalam sejarah pembangunan kota ini. Perubahan nomenklatur Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan KPBPB Batam (BP Batam) tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perluasan mandat kelembagaan dalam pengelolaan sektor-sektor strategis, termasuk sektor pariwisata (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 2020).

Dalam konteks ini, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 menegaskan bahwa kawasan perdagangan bebas dapat mengelola pelabuhan tersendiri, sehingga memperkuat posisi Batam sebagai simpul aktivitas kepelabuhanan dan ekonomi jasa (Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, n.d.). Sejalan dengan kebijakan tersebut, pada tahun 2009, Batam ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan yang melayani kapal layar wisata (*yacht*) melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE- 13/BC/2009 (PT. Multi Utama Consultindo, 2009).

Pada tahun 2012, penguatan peran Batam di sektor pariwisata semakin terlihat dengan diarahkan sebagai destinasi pariwisata berbasis kota, bahari, olahraga dan pusat penyelenggaraan kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE yang semakin memperkuat posisinya sebagai kota jasa dan pariwisata (Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012- 2022, n.d.; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, 2012). Pada tahun 2014, pengelolaan Bandara Hang Nadim ditetapkan berada di bawah BP Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014, dengan tetap mengacu pada standar nasional penerbangan serta sertifikasi dari Kementerian Perhubungan (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 2021).

Selanjutnya, pada tahun 2017 melalui Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor KP 994 Tahun 2017 dan Nomor 1456/SPJ/KA/11/2017 yang menegaskan pembagian kewenangan pengelolaan pelabuhan di kawasan KPBPB. Pada tahun 2021, dalam rangka mempercepat pengembangan serta meningkatkan daya saing KPBPB Batam dan sekitarnya, pemerintah pusat memperkuat kelembagaan pengelolaan kawasan melalui mekanisme yang lebih terintegrasi dengan KPBPB Bintan dan Karimun, termasuk melalui pembentukan Badan Pengusahaan Batam, Bintan, dan Karimun (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, n.d.). Penguatan sektor pariwisata Batam berlanjut dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021. Dalam kerangka kebijakan tersebut, Badan Pengusahaan Batam ditetapkan sebagai Administrator KEK di Batam sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2021 (Netty Muharni, Komunikasi Pribadi, 28 November 2025).

Pada tahun 2022, integrasi kebijakan dan program pengembangan dan pembangunan pariwisata antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam semakin menguat melalui pembangunan infrastruktur pendukung dan diversifikasi produk wisata yang ditandai dengan peningkatan kualitas pelabuhan dan bandara sebagai

pintu masuk utama wisatawan (Novianto, 2022). Penguatan ini antara lain ditandai dengan peningkatan kualitas bandara sebagai pintu masuk utama wisatawan melalui pengalihan pengelolaan Bandara Internasional Hang Nadim dari BP Batam kepada PT. Bandara Internasional Batam, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) selama 25 tahun guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan (PT. Angkasa Pura I, 2022). Selain itu, peningkatan jalan berstandar internasional juga dilakukan dengan cara pengalihan sejumlah ruas jalan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada BP Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022 (Trans Kepri, 2023).

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan seluruh aset jalan provinsi yang berada di wilayah Kota Batam kepada Pemerintah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 485 Tahun 2023, seiring dengan berlakunya status KPBPB Batam secara menyeluruh yang menyebabkan pengelolaan lahan dan infrastruktur di wilayah administrasi Kota Batam tidak terlepas dari kewenangan BP Batam (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, 2023). Pada tahun yang sama, Pemerintah Pusat menetapkan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang mengintegrasikan pengembangan pariwisata dengan kawasan industri terpadu (Sembiring, 2024). Pada tahun 2024, Batam mendapatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tambahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 yaitu KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional, yang semakin memperluas ruang pengembangan sektor pariwisata Kota Batam (Mohamad Taofan, Komunikasi Pribadi, 9 Oktober 2025).

Berdasarkan dinamika tersebut, periode tahun 2007 – 2024 menjadi fase penting dalam sejarah perkembangan Batam sebagai kota wisata. Perubahan status kepabeanan dan perpajakan, pengembangan tambahan fasilitas kepabeanan dan perpajakan pariwisata seperti *yacht* dan berbagai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus menunjukkan adanya transformasi kebijakan dan arah pembangunan kota. Oleh karena itu, penelitian ini membahas “Dinamika Kota Batam sebagai Kota Wisata Tahun 2007–2024” guna memahami perkembangan, kebijakan, serta implikasi pengembangan sektor pariwisata dalam perspektif historis.

KAJIAN TEORITIS

Teori Sejarah Kota

Dalam kajian sejarah kota, perkembangan kota dapat dibagi ke dalam tiga fase utama, yaitu kota tradisional (*prakolonial*) yang berada di bawah kekuasaan lokal dengan teknologi yang masih sederhana, kota kolonial yang berkembang dalam konteks dominasi kekuasaan Eropa, serta kota pascakolonial yang ditandai oleh penguatan identitas lokal setelah kemerdekaan. Kajian sejarah kota juga menekankan lima aspek penting, yaitu ekologi kota, transformasi sosial-ekonomi, sistem sosial, masalah sosial, dan mobilitas sosial. Salah satu bentuk mobilitas sosial yang paling menonjol adalah urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik. Proses ini membawa dampak signifikan terhadap perubahan struktur sosial, baik di daerah asal maupun di wilayah perkotaan, seperti berkurangnya tenaga kerja di desa serta meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial di kota.

Dalam konteks pariwisata, kota memiliki peran strategis sebagai destinasi wisata karena karakteristiknya yang beragam dan kompleks. Keanekaragaman fungsi, kondisi geografis, aktivitas ekonomi, bentuk fisik, serta warisan budaya menjadikan kota sebagai

ruang multifungsi. Kota tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang wisata yang menawarkan pengalaman khas melalui interaksi antara wisatawan dan kehidupan masyarakat lokal. Dinamika tersebut memperkuat posisi kota sebagai destinasi wisata yang terus berkembang (Andriani, 2011).

Teori Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

Perencanaan pariwisata merupakan suatu proses terpadu yang mempertimbangkan berbagai dimensi, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologis, dan teknologi, dengan memperhatikan kondisi masa lalu, situasi saat ini, serta proyeksi masa depan. Tujuan utama perencanaan ini adalah mengarahkan pengembangan pariwisata agar berjalan secara optimal dengan tetap meminimalkan dampak negatif, menjaga kelestarian lingkungan, serta mempertahankan keunikan destinasi.

Perencanaan pariwisata mencakup pengelolaan sumber daya, pengembangan atraksi, penyediaan infrastruktur, serta penyusunan strategi pemasaran yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaannya dilakukan secara bertingkat, mulai dari tingkat nasional, regional, hingga lokal. Namun, dalam praktiknya, perencanaan pariwisata sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan biaya, kompleksitas koordinasi antarlembaga, serta dinamika industri yang menyebabkan perubahan produk wisata secara cepat. Oleh karena itu, perencanaan pariwisata perlu dilakukan secara komprehensif, adaptif, dan terintegrasi (Rahayu & Saragih, 2022).

Keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh beberapa komponen utama, yaitu daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, pasar wisata, aksesibilitas, serta peran masyarakat lokal. Daya tarik wisata merupakan faktor utama yang mendorong kunjungan, baik yang bersifat alam, budaya, maupun buatan. Promosi berperan dalam membangun citra destinasi dan menarik minat wisatawan, sedangkan segmentasi pasar diperlukan untuk memahami karakteristik dan kebutuhan wisatawan. Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan transportasi menuju destinasi, sementara masyarakat lokal berperan dalam mendukung keberlanjutan pariwisata melalui penyediaan layanan dan interaksi sosial (Kusumah, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia secara publik berupa berbagai referensi, seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah, arsip foto, serta informasi dari situs resmi berbagai instansi. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen utama, panduan wawancara, alat tulis, alat rekam, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis data yang terdiri atas tiga alur kegiatan utama yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fasilitas Khusus Pengembangan Pariwisata Batam

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Penetapan Batam sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 yang berlaku sejak tahun 2007 dengan masa berlaku selama 70 tahun bertujuan semakin memperkuat

posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019). KPBPB memiliki fungsi sebagai kawasan pengembangan berbagai kegiatan ekonomi, meliputi perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, kemaritiman dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, hingga pariwisata.

Peran operasional kepelabuhanan dijalankan oleh Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam (BUP BP Batam). Dalam konteks wisata bahari, BUP BP Batam mewajibkan setiap kapal *yacht* asing yang memasuki wilayah KPBPB Batam wajib memenuhi persyaratan administratif serta menjalani prosedur CIQP (*Customs, Immigration, Quarantine, and Port*) pada saat kedatangan. Dari sisi kepabeanan, KPBPB memberikan kemudahan dalam pengelolaan *temporary import* atau *temporary admission* bagi kapal *yacht* asing termasuk pembebasan dan penyederhanaan bea masuk atas barang-barang yang digunakan untuk operasional marina, yang dikelola secara lebih efisien oleh otoritas khusus kawasan (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, n.d.).

Meskipun BP Batam memiliki mandat dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata, secara kelembagaan hingga kini belum terdapat biro pariwisata di lingkungan BP Batam karena belum memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Salah satu pertimbangan utamanya adalah untuk menghormati kewenangan Pemerintah Kota Batam, yang secara struktural memang memiliki tugas dan fungsi utama dalam pengembangan sektor pariwisata daerah (Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, n.d.). Dalam praktiknya, pengelolaan objek-objek wisata yang berada dalam kewenangan BP Batam dilaksanakan melalui Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, yang berperan dalam penyediaan dan pengelolaan sarana serta prasarana pendukung kawasan.

Keberadaan KPBPB memberikan berbagai fasilitas dan insentif fiskal yang berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, termasuk di sektor pariwisata. Insentif tersebut meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pembebasan bea impor dan ekspor ke luar negeri, serta tidak dipungutnya Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang yang dimasukkan ke dalam kawasan (Politeknik Negeri Batam, n.d.). Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam KPBPB dibebaskan dari pengenaan PPN, sementara barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke dalam kawasan juga tidak dikenakan PPN dan Pajak Penghasilan (PPh). Pelaku usaha yang beroperasi di KPBPB tidak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan transaksi antar pelaku usaha di dalam kawasan, termasuk penyerahan barang dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun kawasan berikat ke KPBPB, turut memperoleh fasilitas pembebasan PPN (Netty Muharni, Komunikasi Pribadi, 2 Desember 2025).

2. Kawasan Ekonomi Khusus

Seiring dengan dinamika ekonomi global, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing daerah dan memperluas peluang investasi. Secara konseptual, KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang dirancang untuk menjalankan fungsi ekonomi khusus dan memperoleh berbagai fasilitas dari pemerintah (Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2024). Penerapan KEK di dalam wilayah KPBPB Batam tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan kebijakan, melainkan sebagai strategi penguatan daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Dengan memanfaatkan posisi geoekonomi dan geostrategis Batam yang berada di jalur perdagangan internasional,

keberadaan KEK diharapkan mampu mendorong investasi, ekspor, impor, serta pengembangan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi yang turut memperkuat sektor pariwisata.

Dalam konteks pariwisata, hubungan antara KPBPB dan KEK bersifat saling melengkapi. KPBPB berorientasi pada fasilitasi perdagangan bebas melalui kebijakan pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang impor yang menjadikan Batam unggul sebagai destinasi wisata belanja. Sementara itu, KEK memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menarik investasi di sektor-sektor prioritas termasuk pariwisata dengan menawarkan berbagai kemudahan dan insentif yang lebih kompetitif (Penelitian Pariwisata, n.d.-c, n.d.-b).

Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal kepada pelaku usaha di dalam KEK. Khusus bagi KEK Pariwisata, pemerintah memberikan insentif tambahan berupa pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan atas penjualan hunian atau properti wisata. Kebijakan ini ditujukan untuk menarik minat investor di sektor properti pariwisata sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Pelaku usaha juga berhak memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atau fasilitas khusus untuk penanaman modal di sektor tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas bagi investor dalam menentukan skema insentif yang paling sesuai dengan karakteristik usahanya (Yuliandra, 2025).

3. Kapal *Yacht* Asing

Dukungan pemerintah terhadap pengembangan wisata bahari di Batam di wilayah non Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) salah satunya diwujudkan melalui kebijakan kepabeanan dan perpajakan yang memberikan kemudahan bagi operasional kapal yacht asing di Pulau Nirup. Dalam bidang kepabeanan, Fasilitas Impor Sementara bagi kapal yacht asing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2017, yang memungkinkan kapal yacht asing untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan persyaratan bahwa kapal tersebut terdaftar di negara asing, dimiliki oleh warga negara asing, serta diimpor langsung oleh pemiliknya atau kuasanya. Fasilitas Impor Sementara atas kapal yacht asing diberikan dalam bentuk pembebasan bea masuk sebagai bentuk insentif fiskal yang bertujuan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara melalui jalur laut (Bank Indonesia, n.d.). Untuk mendukung kelancaran pelayanan kapal yacht asing, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam menetapkan kewajiban bahwa setiap kapal yacht asing wajib memenuhi persyaratan berupa Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) serta memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) jika akan melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata di Indonesia dari pelabuhan asal di luar negeri.

Setiap kapal *yacht* juga wajib dilengkapi perangkat radio komunikasi dan sistem identifikasi otomatis (*Automatic Identification System / AIS*) sebagai bagian dari persyaratan keselamatan pelayaran. Selain itu, kapal *yacht* dilarang dikomersialkan, disewakan, atau melakukan pergantian penumpang selama berada di Indonesia, kecuali dalam keadaan darurat. Namun pemilik atau operator kapal *yacht* dapat mengoperasikan kapal *yacht* yang membawa wisatawan dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi perizinan yang berlaku. Pengangkutan wisatawan di pelabuhan diperbolehkan apabila kapal *yacht* telah memiliki legalitas dari negara asal dan bukan merupakan kapal *yacht* pribadi (Indri Wahyu Susanti, Komunikasi Pribadi, 6 Oktober 2025).

Batam Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Kepulauan Riau

1. Keberlanjutan

Data pertumbuhan pariwisata yang mutakhir dan terukur menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan, khususnya bagi pihak swasta, dalam menilai prospek investasi di sektor pariwisata. Keberlanjutan pertumbuhan pariwisata tidak hanya mencerminkan stabilitas destinasi, tetapi juga berperan strategis menarik investasi dan memperkuat daya saing daerah wisata (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019).

a. Pariwisata Berbasis Komunitas

Di Kota Batam, implementasi pariwisata berbasis komunitas tercermin melalui pengembangan 10 desa wisata yang berfungsi sebagai ruang partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan mempromosikan potensi pariwisata lokal secara berkelanjutan. Pengembangan potensi pariwisata di tingkat desa tidak terlepas dari peran Gerakan Sadar Wisata yang dijalankan oleh lembaga atau kelompok masyarakat yang dikenal sebagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis berperan sebagai motor penggerak dalam pengelolaan destinasi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata yang berkelanjutan. Pembentukan Pokdarwis merupakan Amanah dari Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 (Desa Krawon, n.d.).

b. Pariwisata Hijau

Implementasi konsep pariwisata hijau tercermin pada Pulau Nirup di Kota Batam. Pemilihan Pulau Nirup sebagai model destinasi pariwisata hijau didasarkan pada kemampuannya dalam menjaga dan mengelola ekosistem secara berkelanjutan. Pulau ini memiliki perairan yang jernih, lanskap alam yang masih alami, serta terumbu karang yang indah dan terawat, menjadikannya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari dan bawah laut. Keunggulan ekologis tersebut membedakan Pulau Nirup dari pulau-pulau lain di wilayah Kota Batam. Dalam jangka panjang, Pulau Nirup diproyeksikan berkembang sebagai destinasi wisata eksklusif dengan pengembangan berbagai fasilitas berkelas, termasuk resor mewah yang tetap mengedepankan prinsip *green tourism* (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, n.d.).

c. Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa

Pengembangan pariwisata berkelanjutan memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan konsep *smart city* (kota pintar), khususnya dalam mewujudkan destinasi pariwisata berbasis teknologi atau *smart tourism destination*. Sejalan dengan arah tersebut, BP Batam berupaya mengintegrasikan pengembangan teknologi digital dengan sektor pariwisata melalui penguatan ekosistem investasi dan inovasi yang saling terhubung. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berorientasi pada industri digital dan pariwisata, sebagai upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Di sisi pariwisata, KEK Nongsa berkembang sebagai kawasan wisata berstandar internasional dengan dukungan berbagai fasilitas akomodasi dan atraksi wisata. Pengembangan kawasan ini diperkuat oleh infrastruktur pendukung berupa marina, pelabuhan *yacht*, terminal feri internasional, serta lapangan golf yang menunjang kenyamanan dan mobilitas wisatawan.

d. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam (KEK PKIB)

Seiring dengan kemajuan teknologi medis dan semakin terbukanya akses perjalanan internasional, sektor wisata kesehatan mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan

diversifikasi produk pariwisata melalui pengembangan wisata kesehatan atau *medical tourism*. Dalam konteks tersebut, pemerintah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam (PKIB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024. Berbagai layanan unggulan yang direncanakan dalam kawasan KEK PKIB meliputi layanan onkologi, kardiologi, dan neurologi, perawatan bedah berbasis teknologi robotik, pusat kardiovaskular, pusat geriatrik, pusat kesuburan perempuan, pusat kanker, layanan bedah plastik dan estetika, serta pusat *stem cell* (Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2024).

e. Industri Kecil dan Menengah, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Ekonomi Kreatif

Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata di Kota Batam. Sektor ini berkontribusi melalui penyediaan berbagai produk dan jasa yang berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata, seperti kuliner, kerajinan, produk kreatif, akomodasi skala kecil, serta layanan pendukung lainnya (Penelitian Pariwisata, n.d.-b, n.d.-c). Keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata. Produk-produk kreatif lokal juga memiliki potensi sebagai cendera mata khas daerah yang mengandung nilai ekonomi dan budaya (LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia, n.d.).

f. Industri Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran

Industri Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran / *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) merupakan segmen industri pariwisata yang berfokus pada penyelenggaraan kegiatan bisnis dan profesional, yang meliputi pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, serta pameran. Penetapan Batam sebagai salah satu destinasi MICE nasional tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012. Status ini didukung oleh posisi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kemudahan aksesibilitas internasional, keberagaman atraksi wisata, serta ketersediaan amenitas modern. Posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas turut memperkuat daya tariknya sebagai pusat aktivitas bisnis regional, sehingga delegasi yang datang umumnya menghadiri kegiatan profesional sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk menikmati atraksi wisata yang tersedia (Farhandhika Ramadhan, n.d.).

g. Industri Properti

Perkembangan sektor pariwisata dan industri properti merupakan dua fenomena yang saling berkaitan erat. Meningkatnya jumlah wisatawan secara langsung memicu permintaan terhadap akomodasi, seperti hotel, vila, dan apartemen. Selain itu, kebutuhan wisatawan terhadap fasilitas pendukung meliputi restoran, pusat perbelanjaan, ruang rekreasi, dan pusat hiburan, mendorong pembangunan properti komersial. Di sisi lain, pengembangan properti turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan pariwisata. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, serta sistem transportasi publik memperlancar aksesibilitas menuju destinasi. Ketersediaan fasilitas wisata, seperti taman hiburan, pusat konvensi, dan kawasan rekreasi terpadu, semakin memperkuat daya tarik destinasi.

2. Amenitas

Amenitas merupakan seluruh fasilitas penunjang yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan selama berada di suatu destinasi. Ketersediaan amenitas yang memadai dan berkualitas berperan penting dalam membentuk pengalaman

wisata yang positif, meningkatkan tingkat kepuasan pengunjung, serta memperkuat daya saing destinasi pariwisata (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, n.d.).

Tabel 1. Jumlah Amenitas Kota Batam Tahun 2024

Nama Amenitas	Total
Apotek dan Toko Obat	207
Bioskop	8
Hotel	273
Mall	16
Kafe dan Kedai Kopi	321
Laundry	122
Tempat <i>Money Changer</i>	115
Pos Pemadam Kebakaran	123
Pusat Oleh – Oleh	15
Rumah Ibadah	2.159
Rumah Makan dan Restoran	738
Rumah Sakit	21
Sarana Keamanan	16

Sumber: Olahan Pribadi

Berdasarkan data tersebut, Kota Batam memiliki dukungan amenitas yang cukup komprehensif, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. Ketersediaan fasilitas peribadatan yang beragam juga mencerminkan karakter multikultural Kota Batam serta mendukung kenyamanan wisatawan dari berbagai latar belakang.

3. Atraksi

Daya tarik ini dapat berupa keindahan alam, kekayaan budaya, kuliner, kegiatan olahraga, hingga penyelenggaraan acara berskala lokal maupun internasional. Keberagaman atraksi menjadi indikator penting dalam memperkuat daya saing dan karakter suatu destinasi (Penelitian Pariwisata, n.d.-a).

a. Wisata Agrowisata dan Ekowisata

Pengembangan agrowisata di Batam mencakup kawasan pertanian produktif yang dimanfaatkan sebagai objek wisata edukatif, seperti kebun buah dan lahan pertanian lainnya. Selain itu, kawasan agribisnis juga dikembangkan sebagai bagian dari strategi perluasan potensi wisata berbasis pertanian. Sementara itu, pengembangan ekowisata berfokus pada kawasan hutan buru, hutan mangrove, dan hutan wisata yang memiliki karakteristik ekosistem yang beragam. Sebagian besar destinasi tersebut dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat, sementara hanya sebagian kecil yang berada di bawah pengelolaan BP Batam. Kondisi ini menunjukkan peran penting sektor non pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pariwisata agrowisata dan ekowisata di Batam.

b. Wisata Bahari

Sebaran objek wisata bahari di Batam tersebar di berbagai wilayah, meliputi pantai, resort tepi laut, serta pulau-pulau wisata. Sebagian besar destinasi tersebut dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat, sementara hanya sebagian kecil yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, wisata bahari berkembang melalui pemanfaatan ruang pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau sebagai daya tarik utama. Aktivitas yang ditawarkan beragam, mulai dari rekreasi ringan hingga kegiatan berbasis petualangan. Keragaman aktivitas tersebut tidak hanya memberikan pengalaman rekreasi,

tetapi juga mendorong peningkatan daya tarik destinasi serta memperkuat posisi Batam sebagai salah satu kawasan wisata bahari yang potensial (Atillah & Geisha, n.d.).

c. Wisata Belanja

Kota Batam memiliki daya tarik khusus sebagai destinasi wisata belanja. Perbedaan nilai tukar antara rupiah dengan dolar Singapura dan ringgit Malaysia menjadikan harga barang relatif lebih murah bagi wisatawan mancanegara (Supriono, 2017). Selain itu, kebijakan pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk berbagai produk impor, seperti elektronik, kosmetik, pakaian, dan gawai yang menjadikan harga di Batam lebih kompetitif dibanding daerah lain di Indonesia. Faktor-faktor ini memperkuat posisi Batam sebagai tujuan utama wisata belanja (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 2020).

d. Wisata Film

Di Kota Batam, potensi wisata film didukung oleh keberadaan industri kreatif yang mulai berkembang, termasuk sektor produksi audiovisual. Tercatat terdapat sejumlah pelaku industri film yang berkontribusi dalam membangun ekosistem kreatif di daerah ini. Salah satu faktor utama yang memperkuat pengembangan wisata film adalah keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, yang menjadi pusat kegiatan industri digital dan kreatif. Kawasan ini didukung oleh fasilitas produksi berstandar internasional yang telah digunakan untuk berbagai proyek film dan program televisi berskala global. Keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya memperkuat posisi Batam sebagai lokasi produksi, tetapi juga membuka peluang pengembangan wisata berbasis industri kreatif.

e. Wisata Kuliner

Jumlah usaha kuliner di Kota Batam mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini sejalan dengan perkembangan sektor pariwisata dan akomodasi yang mendorong meningkatnya permintaan terhadap layanan makanan dan minuman. Perkembangan ini tidak terlepas dari posisi strategis Batam sebagai kawasan perdagangan bebas yang mendorong pertumbuhan sektor jasa, termasuk usaha makanan dan minuman. Selain itu, pemerintah Kota Batam turut berperan dalam mendorong pengembangan sektor kuliner melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan lapangan usaha dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal (Indri Wahyu Susanti, Komunikasi Pribadi, 6 Oktober 2025).

f. Wisata Olahraga, Hiburan dan SPA

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di Batam tergolong memadai. Berbagai fasilitas olahraga tersedia secara luas, seperti gedung olahraga, kolam renang, serta lapangan untuk berbagai cabang olahraga, termasuk bola basket, bola voli, bulu tangkis, futsal, tenis, dan sepak bola. Salah satu keunggulan Batam terletak pada pengembangan wisata golf. Wilayah ini memiliki jumlah lapangan golf yang relatif banyak dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Wisata golf tidak hanya menawarkan pengalaman olahraga, tetapi juga menghadirkan kualitas fasilitas berstandar internasional yang mampu meningkatkan daya saing destinasi (Hidayat, 2024).

g. Wisata Religi

Di Kota Batam, wisata religi berkembang sebagai bagian dari atraksi pariwisata yang mencerminkan karakter masyarakat yang multikultural. Meskipun belum terdapat destinasi yang secara khusus dirancang sebagai pusat kegiatan ritual keagamaan berskala besar, Batam memiliki berbagai objek wisata religi yang merepresentasikan nilai toleransi, keberagaman, dan harmoni antarumat beragama. Tempat-tempat ibadah

tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana peribadatan, tetapi juga memiliki nilai historis, estetika arsitektural, serta makna sosial budaya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan (Indri Wahyu Susanti, Komunikasi Pribadi, 6 Oktober 2025).

h. Wisata Sejarah

Kota Batam memiliki keterkaitan historis yang cukup panjang, mulai dari masa pengaruh Kesultanan Johor Riau hingga menjadi lokasi penampungan pengungsi Vietnam pada masa lalu, Batam menyimpan sejumlah situs bersejarah yang merefleksikan perjalanan panjang kawasan ini (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, n.d.). Selain itu, karakter Batam sebagai kota tujuan migrasi turut memperkaya dimensi historisnya, menjadikannya sebagai ruang pertemuan berbagai etnis dan budaya. Keberagaman ini membentuk identitas sosial yang dinamis, di mana tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya dari berbagai daerah berkembang secara berdampingan (Ardiwinata, Komunikasi Pribadi, 23 September 2025).

i. Event Pariwisata

Kota Batam merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan penyelenggaraan event sebagai pendorong pertumbuhan pariwisata. Berbagai kegiatan secara konsisten diselenggarakan dengan mengangkat beragam tema, seperti olahraga, kuliner, budaya, dan seni. Keragaman jenis event tersebut memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan sesuai dengan minat dan preferensi masing-masing, sekaligus memperkuat citra Batam sebagai destinasi yang dinamis dan adaptif terhadap tren pariwisata (Gewati, 2019).

4. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan destinasi pariwisata. Konsep ini mencakup kemudahan wisatawan memperoleh informasi mengenai destinasi serta kemampuan mereka untuk menjangkaunya melalui berbagai moda transportasi.

a. Agen dan Biro Perjalanan Wisata, serta Pramuwisata

Perkembangan jumlah pramuwisata, agen dan biro perjalanan wisata di Kota Batam menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pola ini menunjukkan adanya dampak perubahan kondisi eksternal terhadap pelaku usaha perjalanan, sekaligus mengindikasikan pemulihan kebutuhan tenaga pemandu wisata. Dalam rangka meningkatkan kualitas pramuwisata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam terus mendorong pelaksanaan program sertifikasi profesi (Hasan, Komunikasi Pribadi, 20 Oktober 2025). Kebijakan tersebut bertujuan menjamin standar pelayanan, melindungi tenaga kerja, serta meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kegiatan pemanduan wisata (Ardiwinata, Komunikasi Pribadi, 23 September 2025).

b. Transportasi Darat

Transportasi darat merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung aksesibilitas pariwisata untuk memperlancar mobilitas masyarakat maupun wisatawan menuju berbagai kawasan wisata, pusat kegiatan ekonomi, serta area strategis lainnya di Kota Batam.⁸⁹ Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan jalan berstandar internasional. Dari sisi layanan, Kota Batam juga didukung oleh berbagai moda transportasi darat. Transportasi umum tersedia melalui bus Trans Batam dan Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI) yang menghubungkan sejumlah kawasan permukiman, pusat aktivitas, dan lokasi wisata. Selain itu, layanan transportasi *online* berbasis aplikasi seperti *Gojek*, *Grab*, *Maxim*, serta jasa taksi seperti *Bluebird* turut memperluas pilihan mobilitas bagi wisatawan, sehingga perjalanan di dalam kota menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel.

c. Transportasi Laut

Secara umum, Kota Batam memiliki enam pelabuhan, terdiri atas dua pelabuhan berstatus domestik dan internasional, dua pelabuhan internasional, dan tiga pelabuhan domestik. Dalam konteks pengembangan sektor pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan menjadi salah satu program prioritas mengingat peran strategis pelabuhan sebagai simpul konektivitas bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Selain pelabuhan reguler, Batam juga memiliki pelabuhan marina yang melayani kapal *yacht* asing. Keberadaan marina ini mendukung pengembangan wisata bahari, khususnya bagi wisatawan menengah ke atas. Di samping itu, sistem transportasi laut Batam didukung oleh pelabuhan rakyat yang menghubungkan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

d. Transportasi Udara

Bandara Internasional Hang Nadim merupakan salah satu bandara tersibuk di Indonesia dengan kapasitas pelayanan mencapai lima juta penumpang per tahun. Sebagai pintu gerbang utama Kota Batam, bandara ini terus mengalami modernisasi untuk mendukung mobilitas penumpang, memperlancar arus logistik, dan memperkuat pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan bandara juga diperkuat dengan peresmian Gedung *Very - Very Important Person* (VVIP) pada tahun 2024 yang memiliki fasilitas gedung dua lantai dengan luas 1,8 hektare ini dilengkapi fasilitas modern seperti *main lobby, lounge, conference room, private room, musholla, dan multifunction room* (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, n.d.).

e. Media dan Promosi Pariwisata

Kegiatan promosi pariwisata dilakukan secara terpadu melalui kerja sama lintas lembaga, yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta berbagai pemangku kepentingan seperti asosiasi industri, pelaku usaha, dan komunitas kreatif. Strategi *branding* pariwisata Kota Batam diarahkan tidak hanya untuk memperkuat posisi di pasar wisata nasional, tetapi juga memperluas jangkauan ke pasar internasional. Letak geografis Batam yang strategis dan berdekatan dengan Singapura sebagai pintu gerbang utama wisatawan mancanegara menjadi keunggulan yang terus dikedepankan dalam berbagai kegiatan promosi.

5. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan merujuk pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batam dalam periode tertentu dan digunakan sebagai indikator utama untuk menilai perkembangan sektor pariwisata di suatu wilayah. Indikator ini tidak hanya mencerminkan tingkat daya tarik destinasi, tetapi juga menunjukkan kualitas fasilitas pendukung, kesiapan infrastruktur, serta efektivitas strategi promosi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Wisatawan ke Kota Batam

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Nusantara
2007	1.077.306	
2008	1.061.390	
2009	951.384	
2010	1.007.446	
2011	1.161.581	
2012	1.219.608	
2013	1.336.430	

2014	1.454.110	
2015	1.585.719	
2016	1.510.203	
2017	1.564.717	
2018	1.887.284	
2019	1.947.943	2.478.081
2020	299.158	438.230
2021	2.651	479.914
2022	565.936	1.035.693
2023	149.853	1.548.413
2024	1.326.049	1.791.240

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Perkembangan jumlah wisatawan ke Kota Batam menunjukkan pola yang dinamis dalam kurun waktu 2007–2024. Pada periode 2007 hingga 2019, jumlah wisatawan mancanegara cenderung mengalami peningkatan. Namun, pada periode 2020–2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan akibat pandemi COVID-19, dengan jumlah kunjungan turun drastis hingga hanya beberapa ribu pada tahun 2021. Memasuki periode pemulihan, jumlah kunjungan mulai meningkat kembali pada tahun 2022 dan terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2024,

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Batam mencerminkan dinamika sektor pariwisata yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Dengan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, peningkatan jumlah kunjungan dapat terus dioptimalkan sebagai pendorong utama pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah.

2. Jumlah Pengeluaran Wisatawan

Jumlah pengeluaran wisatawan merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana aktivitas pariwisata memberikan dampak ekonomi langsung melalui pengeluaran wisatawan di daerah tujuan (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019).

Tabel 3. Pengeluaran Wisatawan Ke Provinsi Kepulauan Riau

Tahun	Jumlah
2021	Rp. 2.139.000.000.000
2022	Rp. 7.147.240.000.000

Sumber: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pengeluaran wisatawan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini berkaitan dengan proses pemulihan sektor pariwisata setelah masa pandemi COVID-19, yang ditandai dengan kembali meningkatnya mobilitas wisatawan baik dari mancanegara maupun domestik ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan di wilayah ini turut memperoleh dampak dari meningkatnya aktivitas kunjungan tersebut.

KESIMPULAN

Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Kota Batam memasuki fase baru pembangunan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada industri dan perdagangan, tetapi juga diarahkan secara sistematis sebagai kota jasa dan pariwisata

internasional. Status KPBPB memberikan keunggulan kompetitif berupa kemudahan kepabeanan, investasi, dan mobilitas lintas negara yang menjadi fondasi berkembangnya pariwisata lintas batas, khususnya dengan Singapura dan Malaysia. Penetapan Batam sebagai pelabuhan pintu masuk kapal yacht asing sejak tahun 2009. Seiring perkembangan, Kota Batam menjadi destinasi unggulan Provinsi Kepulauan Riau melalui konsep 3S (*size, sustain, and spread*) semakin memperkuat orientasi pariwisata kota ini. Perkembangan tersebut ditopang oleh penguatan unsur-unsur utama pariwisata dalam kerangka 3A, yaitu amenitas, aksesibilitas, dan atraksi.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, Y. (2011). Pariwisata Perkotaan: Teori dan Konsep. Retrieved July 13, 2025, from <https://tentangpariwisata.blogspot.com/2011/01/pariwisata-perkotaan-teori-dan-konsep.html>
- Atillah, R., & Geisha, S. (n.d.). Pengertian Wisata Bahari dan Manfaatnya. Retrieved November 22, 2025, from <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/19/170000269/pengertian-wisata-bahari-dan-manfaatnya>
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (n.d.). Pantai di Batam Terus Disesuaikan Dengan Kebutuhan Investasi. Retrieved July 17, 2025, from <https://bpbatam.go.id/pantai-di-batam/>
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (n.d.). Kepala BP Batam Gelar Syukuran Gedung Baru VVIP Bandara Hang Nadim. Retrieved September 22, 2025, from <https://bpbatam.go.id/kepala-bp-batam-gelar-syukuran-gedung-baru-vvip-bandara-hang-nadim/>
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (2020). *Rencana Strategis BP Batam 2020 – 2024*. Batam, Kepulauan Riau: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (2021). *5 Dasawarsa Pengelolaan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Strategis: Panorama dan Catatan Hikmah Pembelajaran*. Batam, Kepulauan Riau: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Bank Indonesia. (n.d.). Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Yang Potensial Untuk di Biayai Oleh Perbankan. Retrieved December 5, 2025, from <https://www.bi.go.id/id/umkm/database/umkm-layak-dibiayai.aspx>
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (n.d.). Menhub dan Kepala BP Batam Selenggarakan Bersama Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Retrieved October 14, 2026, from <https://portal.dephub.go.id/post/read/menhub-dan-kepala-bp-batam-selenggarakan-bersama-pelabuhan-di-kawasan-perdagangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas-batam>
- Desa Krawon. (n.d.). Mengenal Pokdarwis, Fungsi dan Manfaatnya. Retrieved January 18, 2026, from <https://desakwaron.id/mengenal-pokdarwis-fungsi-dan-manfaatnya/>
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. (n.d.). Wisata Sejarah. Retrieved November 28, 2025, from <https://disbudpar.batam.go.id/wisata-sejarah/>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. (2023). Ini Alasan Kenapa

- Pemprov Kepri Serahkan Seluruh Aset Jalan Provinsi di Batam ke Pemko Batam. Retrieved December 13, 2025, from <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/ini-alasan-kenapa-pemprov-kepri-serahkan-seluruh-aset-jalan-provinsi-di-batam-ke-pemko-batam>.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. (2025). Kick Off Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Batam. Retrieved September 15, 2025, from <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/kick-off-kawasan-ekonomi-khusus-pariwisata-batam>
- Farhandhika Ramadhan. (n.d.). Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Wisata MICE. Retrieved August 18, 2025, from https://www.academia.edu/82476938/Peran_Dinas_Kebudayaan_Dan_Pariwisata_Dalam_Mengembangkan_Wisata_Mice_Meeting_Intencive_Conferenc_e_and%0A_Exhibition_DI_Kota_Batam
- Gewati, M. (2019). Menpar Jelaskan Kenapa Batam Jadi Magnet Wisatawan. Retrieved November 23, 2025, from <https://travel.kompas.com/read/2019/03/01/113242727/menpar-jelaskan-kenapa-batam-jadi-magnet-wisatawan>
- Hidayat, J. A. J. (2024). Dispar Kepri: Wisata Olahraga Jadi Tren Berwisata Setelah COVID-19. Retrieved December 10, 2025, from Antara News website: <https://www.antarane.ws.com/berita/4213739/dispar-kepri-wisata-olahraga-jadi-tren-berwisata-setelah-covid-19>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. (n.d.). Amenitas Pariwisata. Retrieved November 21, 2025, from <https://jdih.maritim.go.id/id/amenitas-pariwisata>
- Kata Batam. (2025). Batam Jadi Gerbang Wisman Nomor Tiga Terbesar Setelah Bali dan Jakarta. Retrieved July 9, 2025, from <https://katabatam.com/batam-jadi-gerbang-wisman-nomor-tiga-terbesar-setelah-bali-dan-jakarta/>
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (n.d.). Nirup Island: Sustainable Green Destination in Batam. Retrieved January 20, 2026, from <https://kemenpar.go.id/en/articles/nirup-island-sustainable-green-destination-in-batam>
- Kusumah, G. (n.d.). Teori Pengembangan Pariwisata: Menjaga Kelestarian Budaya dan Alam di Era Modern. Retrieved July 15, 2025, from <https://mpar.upi.edu/teori-pengembangan-pariwisata-menjaga-kelestarian-budaya-dan-alam-di-era-modern/>.
- LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia. (n.d.). Peran Ekonomi Kreatif dalam Pariwisata Berkelanjutan. Retrieved January 15, 2026, from <https://lsppariwisata.com/blog/peran-ekonomi-kreatif-dalam-pariwisata-berkelanjutan/>
- Novianto. (2022). Program Pariwisata Pemko Batam dan BP Batam Disinkronkan. Retrieved December 13, 2025, from <https://batamclick.com/27/01/2022/program-pariwisata-pemko-batam-dan-bp-batam-disinkronkan/>
- Penelitian Pariwisata. (n.d.-a). Menuju Destinasi Impian Dengan Konsep 3A Pariwisata. Retrieved December 12, 2025, from <https://pelatihanpariwisata.com/menuju-destinasi-impian-dengan-konsep-3a-pariwisata/>
- Penelitian Pariwisata. (n.d.-b). Pemberdayaan UMKM Sebagai Salah Satu Bentuk Pengembangan Pariwisata. Retrieved January 16, 2025, from

- <https://penelitianpariwisata.id/pemberdayaan-umkm-sebagai-salah-satu-bentuk-pengembangan-pariwisata/>
- Penelitian Pariwisata. (n.d.-c). Peran Industri Kecil dan Menengah dalam Menggerakkan Ekonomi Pariwisata Lokal. Retrieved from <https://penelitianpariwisata.id/peran-industri-kecil-menengah-dalam-menggerakkan-ekonomi-pariwisata-lokal/>
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012- 2022.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.*
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.*, (2012).
- Politeknik Negeri Batam. (n.d.). Polibatam dan PT. GDS Indonesia Group Sepakat Tandatangani Kerjasama Pengembangan Data Center Industri. Retrieved January 19, 2026, from <https://www.polibatam.ac.id/polibatam-dan-pt-gds-indonesia-group-sepakat-tandatangani-kerjasama-pengembangan-data-center-industri/>
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2019). Unsur 3S Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas. Retrieved December 23, 2025, from https://babelprov.go.id/siaran_pers/unsur-3s-tetapkan-destinasi-pariwisata-prioritas
- PT. Angkasa Pura I. (2022). PT Bandara Internasional Batam Resmi Kelola Bandara Hang Nadim Batam. Retrieved December 13, 2025, from <https://ppid.ap1.co.id/pt-bandara-internasional-batam-resmi-kelola-bandara-hang-nadim-batam>
- PT. Multi Utama Consultindo. (2009). Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE - 13/BC/2009. Retrieved November 29, 2025, from <https://muc.co.id/id/regulation/3303/surat-edaran-dirjen-bea-dan-cukai-nomor-se-13bc2009>.
- Rahayu, S., & Saragih, M. G. (2022). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2024*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia.
- Sembiring, B. J. E. (2024). *Kronik PSN Rempang Eco - City, Kontroversi Investasi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang*. Pekanbaru, Riau: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau.
- Supriono. (2017). Analisis Deskripsi Potensi Pariwisata Kota Batam Dalam Rangka Menjaring Wisatawan Mancanegara. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 1(2), 103–104.
- Trans Kepri. (2023). Saat Ini Semua Jalan Nasional di Batam Telah Diambil Alih BP Batam. Retrieved December 13, 2025, from <https://transkepri.com/news/detail/16430/saat-ini-semua-jalan-nasional-di-batam-telah-diambil-alih-bp-batam>
- Yuliandra, R. (2025). Didominasi Sektor Kuliner, UMKM di Batam Capai 75 Ribu, Serap 156 Ribu Tenaga Kerja. Retrieved September 30, 2025, from <https://batampos.co.id/2025/05/16/didominasi-sektor-kuliner-umkm-di-batam-capai-75-ribu-serap-156-ribu-tenaga-kerja/>